

KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MELAKSANAKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Studi Kasus di MTsN Ponorogo

*Ju'subaidi**

Abstrak:

Keberagaman kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran atau bahan ajar dan penerapannya dalam proses belajar mengajar akan berdampak pada munculnya keragaman pencapaian kompetensi peserta didik pascapembelajaran. Dua kompetensi guru yang secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Sedangkan kompetensi profesional bagi guru adalah menyangkut tingkat penguasaan materi atau bahan ajar serta pengembangannya. Penelitian ini bertujuan mengungkap dua kompetensi guru pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, observasi, interview dan dokumentasi. Pemilihan dan pemilahan subjek penelitian menggunakan *purposive*. Responden yang terlibat dalam penelitian sebanyak 250 orang dengan rincian, seorang kepala Madrasah, lima orang guru pendidikan agama Islam yang meliputi guru mata pelajaran Akidah Akhlak, al-Qur'an Hadits, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab. Analisis data menggunakan analisis Deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah guru-guru pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo pada umumnya telah memenuhi kompetensi pedagogik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rerata skor kompetensi pedagogik sebesar 62,60 di atas rerata skor idealnya yang sebesar 52,50. Rerata skor tersebut

* Penulis adalah Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo

berkategori positif atau baik. Sedangkan kompetensi profesionalnya masih belum terpenuhi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rerata skor kompetensi profesional sebesar 28,20 berada dibawah rerata skor idelanya. Rerata skor ini yang berada di bawah rerata skor ideal yang sebesar 30 sehingga kategorinya negatif/kurang.

Kata Kunci : *kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, pendidikan agama Islam, rerata skor, rerata skor ideal.*

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan di era otonomi ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya faktor sumber daya pendidikan dan faktor manajemen pendidikan. Sumber daya pendidikan berkaitan dengan pendanaan kesiapan kualitas guru dan media pembelajaran. di sisi lain guru sebagai komponen pendidikan menjadi peran kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan.

Tingkat kualitas guru amat beragam. Ada daerah yang memiliki guru yang berkualitas dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi, namun di sebagian besar daerah kualitas guru masih di bawah standar. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disikapi secara kurang bijaksana oleh para pelaku pendidikan. Di antaranya, masih banyak dijumpai adanya anggapan KTSP adalah Kurikulum baru yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pemberlakuan Kurikulum 2004 (KBK) tidak dilaksanakan secara serentak, tetapi dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tanggung jawab untuk membantu sekolah-sekolah dalam kegiatan persiapan sampai pada implementasinya.

Waktu persiapan sampai tahun 2007 dan tahun 2008 semua sekolah wajib menerapkan Kurikulum 2004. Dengan tenggang waktu persiapan 4 tahun diharapkan sekolah-sekolah mampu mempersiapkan seluruh komponen-komponen seperti mensosialisasi perubahan kurikulum, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, pengembangan fasilitas dan sumber belajar, mengembangkan kemandirian kepala sekolah, mengubah pola pikir guru, dan memberdayakan tenaga kependidikan. Pada saat sebagian besar guru belum memahami dan melaksanakan Kurikulum KBK, dalam tenggang waktu tertentu

muncul KTSP. Anggapan inilah yang menimbulkan sikap apriori dan penolakan secara psikologis terhadap perubahan.

KTSP merupakan kurikulum yang dianggap sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya ini memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah (lembaga tingkat satuan pendidikan) untuk pengembangannya. Guru dan sekolah diberikan kebebasan untuk berkreasi dengan berpatokan pada standar isi, standar kompetensi lulusan dan panduan penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah (BSNP), yang mana hal ini dikarenakan beberapa alasan antara lain:

1. Sosialisasi tentang implementasi KTSP masih minim. Selama ini, pelaksanaan KTSP di sekolah sangat bergantung kepada kreativitas dari masing-masing sekolah. Sosialisasi tentang KTSP yang dilaksanakan selama ini hanya membahas aspek-aspek umum tentang KTSP, misalnya tentang konsep KTSP. Di sisi lain, pembahasan tentang pelaksanaan KTSP di sekolah jarang dilakukan. Padahal, aspek yang justru diperlukan oleh para guru yaitu pengimplementasikan KTSP pada masing-masing bidang studi.
2. Sebagaimana tersebut dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya.
3. Sebagaimana dalam memahami KBK, kadar wawasan dan pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap KTSP masih sangat beragam bahkan masih kurang, yang tentu akan berdampak pada keragaman penerapannya di lapangan, terutama dalam KBM-nya yang mengakibatkan hasil pembelajaran tidak akan berubah sebagaimana yang diharapkan oleh tuntutan KTSP.
4. Kenyataan di lapangan masih terdapat sebagian guru SMP/MTs Khususnya mata pelajaran pendidikan Agama yang belum mampu membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berorientasi pada kurikulum KTSP, hal ini disebabkan sebagian guru masih terbiasa dengan sistem lama di mana menempatkan guru sebagai pusat proses pembelajaran.

Mansur menjelaskan ada beberapa faktor hambatan di antaranya, yaitu hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih belum paham benar akan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran

melalui pendekatan kontekstual, baik konsep maupun penerapannya.¹

Guru sebagai ujung tombak, pelaksanaan kurikulum perlu dipersiapkan secara baik agar mampu menjabarkan kurikulum dengan tepat dalam proses pembelajaran. Pelatihan dan penataran baik dilakukan oleh pemerintah maupun dalam wadah musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) yang dipe-runtukan untuk guru harus komperhensif, mulai dari memahami, mengerti kemudian mengimplementasikan dalam proses pembelajaran.

Dalam pelaksanaan KTSP guru dituntut untuk membuktikan 4 fak-tor utama keprofesionalannya, yaitu 1) menyusun silabus, membuat RPP berdasarkan kemampuan dasar yang dapat digali dan dikembangkan dari peserta didik, 2) melaksanakan rencana pembelajaran, 3) menggunakan ber-bagai metode dan media pembelajaran yang diperlukan, 4) mengevaluasi proses dan hasil kegiatan belajar mengajar dengan berbagai bentuk dan sistem penilaian.

Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru yang akan menerapkan dan mengaktualisasikan kurikulum. Kompetensi guru itu berkaitan dengan pengetahuan serta tugas yang diemban. Di sisi lain kegagalan perubahan kurikulum juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru.

Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional, madrasah tsanawiyah baik negeri maupun swasta memiliki kedudukan yang sama dengan SMP baik negeri maupun swasta. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Ta-hun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentu juga tidak memiliki perbedaan perlakuan antara Madrasah Tsanawiyah maupun Sekolah Menengah Pertama. Memperhatikan pember-lakuan secara resmi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sejak tahun 2006 dan rencana arah pengembangan menjadi Rintisan Sekolah Ber-tarap Internasional (RSBI), apakah guru-guru Pendidikan Agama Islam telah memenuhi tuntutan kurikulum yang baru?. Untuk menjawab hal ini perlu dilakukan penelitian tentang kompetensi guru khususnya guru pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo yang berlokasi di Desa Japan Kecamatan Babadan adalah salah satu dari beberapa MTsN di wilayah Ka-bupaten Ponorogo yang telah tercatat sebagai RSBI di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dengan status tersebut Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo

1 Mansur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Intekstual Panduan Guru-Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 6-8.

diasumsikan telah memenuhi berbagai persyaratan menjadi Sekolah/Madrasah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Untuk mengetahui terpenuhinya tuntutan kesiapan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai prasarat menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tersebut perlu dilakukan penelitian. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini difokuskan di MTsN Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Ki Ageng Mirah Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana kompetensi pedagogik guru Agama Islam dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran?; bagaimana kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam dalam penguasaan materi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru pendidikan Agama Islam dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran; kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam dalam penguasaan materi. Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah bagi Kementerian Agama dan kepala Madrasah sebagai data awal dalam melakukan revitalisasi kualitas guru; memberikan informasi yang akurat dan ilmiah kepada guru tentang kompetensi yang dimilikinya; memberikan gambaran umum kepada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan kemampuan wawasan, kreatifitas dan ketrampilan profesional guru pembuat dan pelaksana KTSP; menjadi referensi dan sumber acuan bagi peneliti lain dalam mengkaji masalah yang sama.

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

a. Pengertian dan Tujuan KTSP

Merujuk pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 1 ayat 15. bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP disusun oleh masing-masing satuan pendidikan merupakan sebuah orientasi pendidikan yang sangat demokratis, diberikan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi (SK), dan kompetensi dasar (KD)

yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).²

Menurut Sanjaya, ada 3 hal yang berhubungan dengan makna kurikulum operasional: *pertama*, sebagai kurikulum yang bersifat operasional. *Kedua*, sebagai kurikulum operasional, pengembang KTSP dituntut dan harus memperhatikan ciri khas ayat 2, bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik; *Ketiga*, sebagai kurikulum operasional,³ para pengembang kurikulum di daerah memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum menjadi unit-unit pelajaran, misalnya mengembangkan strategi, metode, evaluasi pembelajaran agar kompetensi dasar yang telah ditentukan dapat tercapai.

Menurut Suparno, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum untuk satuan pendidikan atau sekolah.⁴ Demikian pula menurut Yamin bahwa penerapan KTSP menuntut aktivitas dan partisipasi para peserta didik yang lebih banyak dalam proses pembelajaran.⁵ KTSP dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi jam efektif yang mencolok banyaknya, dan penekanan KTSP bukan mengejar target materi tetapi memaksimalkan proses dalam pembelajaran dan mengembangkan kompetensi peserta didik. Karena dengan proses pembelajaran yang maksimal akan membuahkan hasil (*output*) yang berkualitas.

Menurut Mulyasa, secara umum tujuan diterapkan KTSP adalah untuk mendirikan dan memperdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada sekolah dan mendorong untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif,⁶ sedangkan secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk: 1) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia; 2) meningkatkan kepedulian warga, sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui

2 Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran : Teori dan Praktek Pengembangan KTSP* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 128.

3 *Ibid.*,

4 Paul Suparno, *Kajian & Pengantar Kurikulum IPA SMP & SMA* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2007), 56-57.

5 Martinis Yamin, *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada, 2008), 113-114.

6 Mulyasa E, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 22.

pengambilan keputusan bersama; dan 3) meningkatkan kompetensi yang sehat antara satuan pendidikan yang akan dicapai.⁷

Dari uraian di atas, dapat diartikan bahwa KTSP yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum tersebut memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah (lembaga tingkat satuan pendidikan) untuk mengembangkannya. Guru dan sekolah diberikan kebebasan untuk berkreasi dengan berpatokan pada standar isi, standar kompetensi lulusan dan panduan penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

b. Prinsip pengembangan KTSP

KTSP seharusnya dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
2. Beragam dan terpadu; kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan; pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha dan dunia kerja.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan; substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

⁷ Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, 132-133.

6. Belajar sepanjang hayat;
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Menurut Olivia,

*“curriculum is perceived as a plan or program for all the experiences which the learner encounters under the direction of the school. In practice, the curriculum consists of a number of plans, in written form and of varying scope, that delineate the desired learning experiences. The curriculum, therefore, may be a unit, a course, a sequence of courses, the school’s entire program of studies-and-may take place outside of class or school when directed by the personnel of the school “.*⁹

Definisi di atas menjelaskan bahwa kurikulum adalah sebuah rencana atau program bagi seluruh pengalaman yang dialami pembelajar di bawah pengawasan sekolah. Kurikulum meliputi segala sesuatu yang menjadi program sekolah, baik yang dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah di bawah pengawasan personel sekolah.

Crunkilton & Cutris, mengemukakan bahwa *“curriculum may be defined as the sum of the learning activities and experiences that a student has under the auspices or direction of the school”*.¹⁰ Kurikulum dipandang sebagai konsep yang memuat aktivitas pembelajaran di sekolah di mana kurikulum dijadikan sebagai sumber pijakan sekaligus orientasi dari tujuan pembelajaran.

Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan berbagai abstraksi yang sering kali mendominasi penulisan kurikulum, akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan, inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian-penyesuaian lain yang dianggap penting. Yang jelas pengembangan kurikulum adalah suatu

8 BNSP, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah* (Jakarta: BNSP, 2006), 5-7.

9 Olivia P.F, *Developing The Curriculum* (New York: Harpercollins Publisher, 1992), 9.

10 Crunkilton & Curtis, *Curriculum Development in Vocational and Technical Education; Planning, Content and Implementation* (Sidney: Allyn and Bacon, Inc, Boston London, 1979), 2.

proses yang menyeluruh dan berkelanjutan. Proses itu sendiri berlangsung secara bertahap berdasarkan mekanisme tertentu.¹¹ KTSP dikembangkan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kelulusan dan Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23.

Pengembangan KTSP berdasarkan konteks permasalahan dan kebutuhan serta perubahan. Konsep pengembangan kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis menyangkut tujuan, metode, penilaian dan *feedback*, sebagaimana dijelaskan oleh Hamalik bahwa pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses yang terdiri dari empat unsur yakni: a) Tujuan, b) Metode dan material, c) Penilaian (*assesment*), d) Balikan (*feedback*)¹²

Prinsip-prinsip pengembangan KTSP tersebut menjadi kerangka acuan dalam desain pembelajaran dan juga berorientasi pada prinsip, tujuan, kesesuaian, efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, kontinuitas, kesinambungan, keterpaduan dan mutu. Prinsip berorientasi pada tujuan bermakna bahwa kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional.

c. Komponen KTSP

Dalam panduan penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP meliputi empat komponen, yaitu: 1) Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 2) Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, tertuang dalam standar isi, 3) Kalender pendidikan, 4) Silabus dan rencana pembelajaran.¹³

d. Pelaksanaan KTSP

Keberhasilan proses pelaksanaan kurikulum dipengaruhi kemampuan guru dan kepala sekolah dalam mendesain proses pembelajaran.

11 Omar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 89.

12 *Ibid*, 91

13 Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, 143-148.

Mulyasa menyatakan implementasi merupakan penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.¹⁴ Tugas guru dalam melaksanakan KTSP adalah bagaimana memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang dikemukakan dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Secara garis besar, implementasi kurikulum mencakup tiga kekuatan pokok, yaitu: (1) pengembangan program; (2) pelaksanaan pembelajaran.; (3) evaluasi hasil belajar.¹⁵

Menurut Karnadi, KTSP di setiap sekolah setingkat SD, SMP dan SMA, akan membuat guru semakin pintar, karena mereka dituntut harus mampu merencanakan sendiri materi pelajarannya untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Menurutnya pula bahwa kurikulum yang selama ini dibuat dari pusat, menyebabkan kreativitas guru kurang terpupuk, tetapi dengan KTSP, kreativitas guru bisa berkembang.¹⁶

Guru yang baik, mempunyai karakteristik dilihat dari individual, sikap, pengalaman, dan prestasinya. Untuk meningkatkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Yamin, bahwa “seorang guru bertugas memberi pembelajaran terhadap peserta didik dengan memberi pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif: dinamis dan dialogis”.¹⁷

Dengan demikian, sikap kreatifitas harus dimiliki oleh guru dalam upaya mendesain pembelajaran yang lebih mampu membangun peserta didik untuk mencapai kompetensi yang seharusnya dikuasai.

14 Mulyasa E., *Kurikulum Tingkat Satuan*, 178.

15 Joko Susilo., *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Manajemen Pelaksanaan dan Persiapan Sekolah Menyongsongnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 176-177.

16 (http://www.erlangga.co.id/suara_pembaruan). (diakses tanggal, 15 Maret 2011).

17 Martinis Yamin., *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada, 2008), 22.

2. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian

Rumusan pengertian pendidikan Islam yang didasarkan pada pengertian etimologi adalah suatu proses internalisasi pengetahuan dan nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik melalui pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensi yang dimilikinya untuk mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup jangka pendek (di dunia) dan jangka panjang (di akhirat).

Sebagai sebuah sistem, pendidikan Islam memiliki komponen-komponen pendidikan yang meliputi, *tujuan, pendidik, peserta didik, alat dan lingkungan*.

b. Tujuan Pendidikan Islam;

Rumusan tujuan pendidikan Islam seharusnya berorientasi pada hakekat pendidikan Islam itu sendiri yang meliputi:

Pertama, tujuan diciptakannya manusia untuk mengabdikan kepada Allah Swt. dan tugasnya adalah beribadah kepada Allah serta sebagai wakil-Nya (*khalifah Allah*) di muka bumi sebagaimana yang difirmankan Allah Swt. Dalam QS. al-An'am 162), "*Katakanlah! sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan Sekalian 'alam*". *Kedua*, tujuan hendaknya memperhatikan sifat-sifat dasar manusia, yaitu makhluk yang memiliki beberapa potensi bawaan, seperti fitrah agama, bakat minat, sifat dan karakter yang berkencenderungan pada *al-hanief* (rindu akan kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam sebatas kemampuan, dan kapasitas yang dimilikinya. *Ketiga*, tuntutan masyarakat baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dunia modern. *Keempat*, dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dimensi tersebut mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal hidup di akhirat, serta nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhir yang lebih membahagiakan. Keseimbangan dan keselarasan antara dua kepentingan hidup tersebut akan dapat menjadi daya tangkal terhadap pengaruh negatif yang muncul dari perkembangan budaya.

Dari beberapa pendapat di atas ditarik benang merahnya tentang tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang memiliki kesempurnaan material maupun spiritual dan memiliki kesadaran akan fungsi dan perannya sebagai hamba Allah Swt. serta wakil-Nya di bumi yang tetap didasarkan pada akidah yang benar.

c. Pendidik dalam Islam

1. Pendidik dalam Islam; Dalam konteks pendidikan Islam “pendidik” disebut dengan istilah *murabbi*, *mu'allim*, *mu'addib*, *mudarris* dan atau *mursyid*. Menurut Ahmad Tafsir,¹⁸ pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
2. Tugas Pendidik dalam Islam, menurut Imam Ghazali adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan dan mengarahkan hati nurani manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan kata lain jika pendidik belum mampu membiasakan diri beribadah kepada-Nya, maka tugas pendidik dianggap gagal. Sementara rumusan tugas guru (jika identik dengan pendidik) dalam undang-undang guru dan dosen (pasal.1 ayat.1) adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam; Kompetensi diartikan sebagai sebuah kecakapan, atau kewenangan, atau kekuasaan, atau kemampuan terhadap sesuatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh seseorang. W. Robert Houston dalam Masalah-masalah ilmu Keguruan, mendefinisikan kompetensi dengan; “*competence ordinarily is defined as adequacy for a task or as possession of require knowledge, skill, and abilities*”, suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.¹⁹

¹⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 74-75.

¹⁹ Rostiyah NK., *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan* (Jakarta, Bina Aksara;1982), 86.

Dalam melaksanakan pendidikan Islam diasumsikan bahwa setiap orang wajib mendakwahkan ajaran agamanya. Hal ini dapat dipahami dari beberapa firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl. 125; Al-Syura. 15; Ali Imran. 104; al-‘Asyr. 1-3, dan Hadits Nabi Saw. “*sampaikan ajaran dariku walau hanya satu kata*”. Dari ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa siapapun dapat menjadi pendidik dalam pendidikan Islam, dengan catatan/syarat; 1) memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih, 2) mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan, 3) penganut Islam yang patut dicontoh, 4) bersedia memberikan pengetahuan dan nilai Islam pada pihak lain.

Menurut Muhaimin & Abdul Mujib, untuk menjadi pendidik yang akan berhasil dalam menjalankan tugasnya, hendaknya seorang pendidikan memiliki kompetensi; 1) personal-religius; 2) sosio-religius; 3) professional-religius. Ia meletakkan religiusitas dalam setiap kompetensi untuk menunjukkan adanya komitmen pendidik terhadap ajaran Islam.²⁰

d. Guru Profesional

Kompetensi pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan dan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen, meliputi empat komponen, yaitu: (1) Kompetensi pedagogis, (2) kompetensi profesional yaitu penguasaan bidang ilmu yang diajarkan, (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi kepribadian.

Guru sebagaimana yang dimaksud pada Bab I pasal 1 UU Nomor 14 tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pengakuan terhadap keprofesionalan guru dibuktikan dengan adanya kepemilikan sertifikat pendidik.

Dengan demikian, guru profesional adalah pendidik yang memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti hukum dan bertugas utamanya adalah

²⁰ Muhaimin dan Abdul Mujib., *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung, Trigenda Karya, 1993), 173.

membimbing, mengajar, mendidikan, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik baik pada jenjang pendidikan usia dini, sekolah dasar maupun menengah.

e. Prinsip-prinsip Profesionalitas

Profesi guru sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut; a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, e) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan, dan h) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

f. Kompetensi Guru Pendidikan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 pasal 16 menjelaskan bahwa secara khusus guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi kepemimpinan di samping empat kompetensi guru yang telah dicantumkan pada UU Nomor 14 tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Sedangkan kompetensi pedagogik sebagaimana yang dimaksud pada permenag nomor 16 tahun 2010 ayat 1 meliputi:

1. Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosioanl dan interlektual.
2. Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama.
3. Pengembangan kurikulum pendidikan agama.
4. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama.
6. Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama.
7. Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

8. Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama.
9. Pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama.
10. Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.

Adapun kompetensi *profesional* guru pendidikan agama meliputi:

- a. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama.
- b. Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama.
- c. Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif.
- d. Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

g. Kode Etik Pendidik

norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, temannya, dan atasannya. Pelanggaran terhadap kode etik akan mengurangi nilai dan kewibawaan (*haibah*) seorang pendidik.

Adapun kode etik pendidik dalam pendidikan Islam menurut Athiyah al-Abrosyi meliputi; a) memiliki watak kebapakan, b) adanya komunikasi aktif, c) memperhatikan kemampuan dan kondisi peserta didik, d) mengetahui kepentingan bersama, e) memiliki sifat-sifat keadilan, kesucian, kesempurnaan, f) adanya keikhlasan, d) dalam mengajar menggunakan pola *integrated curriculum*, h) memberi bekal peserta didik dengan ilmu yang mengacu pada masa depan, i) sehat jasmani dan rohani.²¹

h. Peserta didik

Pemahaman terhadap hakekat peserta didik mejadi penting bagi seorang pendidik. Kesalahan dalam memahami hakekat peserta didik

²¹ Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *al-Tarbiyah al-Islamiyah dan Falasifuha* (Mesir, al-Halabi; 1969), 225.

akan berbuah kegagalan dalam proses pendidikan.

Karakteristik peserta didik sebagaimana yang dijelaskan oleh Suwarno yang dikutip Abdul Mujib meliputi;

1. Peserta didik bukan minatur orang dewasa, ia memiliki dunianya sendiri.
2. Peserta didik memiliki kebutuhan dan tuntutan untuk pemenuhan kebutuhannya secara maksimal.
3. Peserta didik memiliki perbedaan antar individu baik secara endogen (*fitrah*) maupun eksogen (*lingkungan*).
4. Peserta didik sebagai kesatuan system manusia.
5. Peserta didik sebagai subjek dan objek sekaligus.
6. Peserta didik mengikuti pereodesasi, tempo dan irama perkembangannya sendiri.²²

i. Kurikulum

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melahirkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan tersusunnya kurikulum pada Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan bagi setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sedangkan kurikulum pendidikan agama (Islam) termasuk pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia (PP.19 Tahun 2005; Psl. 6 ayat 1).

Kurikulum nasional pendidikan Agama Islam yang berbasis kompetensi dasar (*basic competency*) dapat mencerminkan kebutuhan keberagaman siswa secara nasional. Dengan berbasis kompetensi dasar, maka pengembangan kurikulum hendaknya; 1) menitikberatkan pencapaian target kompetensi ketimbang penguasaan materi; 2) lebih mengakomodasi keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia; 3) memberikan kebebasan yang lebih luas ke-

²² Jusuf, *Ilmu Pendidikan*, 105.

pada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Kurikulum dalam Pendidikan Islam, merupakan program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis berdasarkan norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

b. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian Makki (2008) berjudul, “Kesiapan Madrasah Aliyah Negeri dalam Melaksanakan KTSP di Kabupaten Bantul” menyimpulkan bahwa pemahaman kurikulum dalam melaksanakan KTSP di MAN Bantul cukup baik

Penelitian lain oleh Marengke (2008) berjudul “Evaluasi Kesiapan Guru SMU pada Pelaksanaan KTSP di Kota Ternate” menyimpulkan 1) secara umum tingkat kesiapan guru dalam pelaksanaan KTSP di lima SMUN belum siap. 2) Pemahaman guru terhadap KTSP sudah paham 3) ketrampilan guru dalam menyusun KTSP di lima SMU ternate kurang trampil. Berdasarkan data di atas keberhasilan pelaksanaan kurikulum ditentukan oleh kompetensi dari guru dan kesiapan sekolah dalam memfasilitasi guru dalam pelaksanaan kurikulum.

Jika memperhatikan penelitian di atas tampaknya belum ada yang meneliti di Madrasah Tsanawiyah Negeri tentang kesiapan guru PAI khususnya dalam melaksanakan KTSP. Oleh karena itu, penelitian ini akan menfokuskan pada persoalan kompetensi guru PAI dari aspek pedagogik dan profesionalisme serta dibatasi di MTsN Setono Ponorogo. Pembatasan setting penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang lebih mendalam tentang kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru PAI khususnya di lokasi penelitian tersebut.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitiannya survey bukan eksperimen.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan MTs Negeri Setono Ponorogo dan

penelitian dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan bulan Agustus 2011.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang meliputi guru Fiqih-Ibadah, Akidah Akhlak, Sejarah Islam, Al Qur'an-Hadits dan Siswa kelas VIII pada MTs Negeri Setono Ponorogo. Sedangkan objek penelitian adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Teknik Samplangnya dengan *purposive*.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan meliputi;

1. Observasi (pengamatan)

Observasi dilakukan adalah: (1) pengamatan deskriptif; untuk memperoleh gambaran secara umum tentang KTSP, (2) pengamatan terfokus; mengamati proses pelaksanaan pembelajaran KTSP. Instrumen yang digunakan adalah Lembar Observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu tehnik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk menverifikasi, melakukan *cross-check*, mengubah dan memperluas informasi. Wawancara digunakan untuk mengungkapkan apakah KTSP sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan permendiknas, hambatan-hambatan yang dialami, dan hasil yang dicapai oleh siswa. Instrumennya Catatan Lapangan.

3. Angket

Angket mengenai kompetensi guru pendidikan agama Islam tentang; 1) kompetensi pedagogik yakni kemampuan merencanakan, melaksanakan pembelajaran; dan (2) kompetensi profesional yakni penguasaan materi. Instrumennya kuesioner.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari data yang tertulis dalam dokumen untuk melengkapi data yang digunakan dalam penelitian. Dalam menggunakan dokumen, peneliti memegang *check list* mencatat komponen yang sudah ditentukan dengan

maksud mengecek keaslian dokumen, kebenaran isi dokumen, relevan tidaknya dokumen dengan tujuan dan masalah penelitian. Adapun data-data dokumen yang diambil adalah data guru, peserta didik, data sekolah, silabus mata pelajaran pendidikan agama Islam, RPP.

b. Keabsahan data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dimaknai baik dan dapat mendekati kebenaran, dalam hal ini, keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas melalui uji Kredibilitas yang dilakukan dengan cara: perpanjangan data, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat.²³ Untuk mendapatkan data yang representatif digunakan triangulasi/gabungan antara jawaban yang diberikan oleh responden baik melalui angket, wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang didukung data kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing komponen kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Langkah-langkah analisis meliputi: (1) menghitung skor (tertinggi dan terendah) pada masing-masing komponen; (2) menghitung rerata skor masing-masing komponen atau *mean ideal* (X); (3) menentukan simpangan baku ideal (SBx); dan (4) menentukan tingkat kecenderungan.

Tingkat kecenderungan dibagi dalam empat kategori seperti tampak pada Tabel di bawah. Tingkat kecenderungan ini menjadi kriteria analisis selanjutnya. Perhitungan *mean ideal*, simpangan baku ideal mengacu pada bukunya Djemari Mardapi (Mardapi, 2008: 123).

Mean idea/rerata (X) = $1/2 \times$ (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) Simpangan Baku (SBx) = $1/6$ (skor tertinggi ideal-skor terendah ideal):

²³ Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta: 2011), 368.

Kategori Penilaian

No.	Rentang Skor	Intepretasi
1	$X \geq \bar{X} + 1.SBx$	Sangat Positif/sangat tinggi/sangat baik
2	$\bar{X} + 1.SBx > X \geq \bar{X}$	Tinggi/Positif/baik
3	$\bar{X} > X \geq \bar{X} - 1.SBx$	Negatif/rendah/kurang baik
4	$X < \bar{X} - 1.SBx$	Sangat negatif/rendah/kurang baik

Keterangan Tabel :

\bar{X} = rerata skor keseluruhan siswa dalam satu kelas

SBx = simpangan baku skor keseluruhan siswa dalam satu kelas.

X = skor yang dicapai siswa.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Data

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ponorogo berlokasi di dalam kota, status bangunan milik pemerintah. Gedung (lantai semen, keramik, dan dinding batu bata), kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada pagi hari, kondisi guru adalah lulusan Sarjana. Madrasah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai hal ini ditandai dengan tersedianya hampir semua sarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sebuah pendidikan yang baik.²⁴

Tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa yang ada di MTsN Ponorogo pada saat dilakukan penelitian ini berjumlah 66 orang dan 687 siswa. Rincian tenaga pendidik dan kependidikan dan siswa dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel
Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa

Kategori	J. Kelamin		Pendidikan			Status Peg.		Sertifikasi		Jumlah
	Lk	Pr	S-1	S-2	S-3	PN	Non-PN	Sdh	Blm	
Guru	27	22	44	5	-	42	7	34	8	49
T.U	9	8	-	-	-	-	-	-	-	17
Siswa	387	300	-	-	-	-	-	-	-	687

Jumlah guru pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo berjumlah empat belas (14) orang yang menguasai lima mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Rincian mata pelajaran

²⁴ Profil Madrasah Tsawaniyah Negeri Ponorogo 2011.

PAI dan pengampu mata pelajaran tersebut tertera pada tabel berikut;

Tabel
Guru Pendidikan Agama Islam

Kategori GPAI	J. Kel		Pendidikan			Status Peg.		Sertifikasi		Jml
	Lk	Pr	S-1	S-2	S-3	PN	Non-PN	Sdh	Blm	
Qur'an- Hadits	3	-	3	-	-	3	-	2	1	3
Akidah Akhlak	2	1	3	-	-	3	-	1	2	3
Fiqih	-	2	2	-	-	2	-	1	1	2
SKI	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1
B. Arab	3	2	5	-	-	4	1	2	3	5
Jumlah	9	5	14	-	-	13	1	7	7	14

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan berpendidikan sarjana strata satu (S-1). Status yang dimiliki para guru pendidikan agama Islam meliputi 13 (tiga belas) orang berstatus tetap dan atau pegawai negeri dan seorang lagi masih bersatatus guru tidak tetap. Sedangkan guru yang sudah lulus sertifikasi pendidik sebanya tujuh orang dan tujuh lainnya belum tersertifikasi.

Pelaksanaan KTSP pada MTs Negeri Ponorogo dalam penelitian ini diketahui melalui observasi, pengisian angket, wawancara, dan dilengkapi dengan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo dengan jumlah responden adalah 5 orang guru dari 14 guru pendidikan agama Islam, 250 siswa dari 687 siswa yang ada dan 1 orang kepala madrasah, dengan mengisi angket dan diwawancarai. Sedangkan responden yang diobservasi sebanyak dua orang dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jumlah responden dalam penelitian ini dapat ditampilkan sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel
Responden Penelitian

No	Responden	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		S-1	S-2	S-3	
1	Kepala Madrasah	1	-	-	1
2	Guru	5	-	-	5
3	Siswa	250			250
Jumlah					256

Tabel. 5 mendeskripsikan responden yang terdiri dari 5 guru dengan berpendidikan sarjana strata-1 (S-1) bahkan pada tabel 2 dapat diketahui seluruh guru PAI berpendidikan strata-1, yang dilibatkan dalam pengisian

angket 10 orang guru dari 14 guru, akan tetapi yang mengembalikan angket sebanyak 5 orang guru. Sedangkan yang diobservasi dalam proses pembelajaran sebanyak dua orang yakni guru mata pelajaran al-Qur'an-hadits dan Fiqih. Adapun responden yang diwawancarai sebanyak 2 orang guru dan seorang kepala madrasah. Seratus lima puluh (150) siswa dari 687 dijadikan responden diminta untuk mengisi angket dan sekaligus dijadikan *co-observer* dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Sementara jumlah responden dari siswa dibagi ke dalam lima kelompok yang disesuaikan dengan jumlah mata pelajaran yang tercakup dalam PAI. Peneliti menjadikan responden dari siswa sebagai *co-observer* dengan harapan akan diperoleh tingkat keaslian perilaku guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Namun perlu di maklumi bahwa *co-observer* dari siswa tentu memiliki kelemahan walaupun telah diberi petunjuk. Untuk mendukung hasil observasi siswa terhadap perilaku belajar mengajar guru peneliti tetap juga melakukan observasi dengan objek obeservasi yang sama. Dengan demikian masing-masing guru mata pelajaran diobservasi oleh 30 responden dari siswa.

2. Hasil Penelitian

Dari hasil analisis data Kompetensi guru PAI yang diteliti adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional rerata skor dua kompetensi guru PAI di MTs Negeri Ponorogo secara umum dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel
Rerata skor Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAI

Kompetensi	Rerata Skor	Rerata Ideal	Kategori
Pedagogik	62,60	52,50	Positif
Profesional	28,20	30	Negatif

3. Analisis dan Pembahasan

1. Kompetensi Pedagogik Guru PAI

Kompetensi pedagogik yang diteliti meliputi kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran diungkap melalui angket, wawancara, dan studi dokumentasi berupa RPP. Kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran diungkap melalui angket, wawancara, dan observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas IX A, IX B, VII F, VIII F, VIII B.

Adapun hasil analisis dari kompetensi pedagogik untuk keseluruhan guru Pendidikan Agama Islam yang meliputi guru mata pelajaran Akidah Akhlak, al-Qur'an Hadits, Fikih, Sejarah kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab sebagai berikut; rerata skor (\bar{x}) adalah 62,60 (kategori positif), rerata standar deviasi 0,71, rerata skor maksimal angket adalah 3,9 dan rerata minimal angket pada 2,05 (lampiran 1). Kondisi ini dikarenakan guru PAI secara teoritik telah menguasai berbagai karakteristik peserta didik teori-teori belajar dan adanya pemahaman secara umum terhadap KTSP. Hal ini dapat dimaknai bahwa secara umum guru Pendidikan Agama Islam telah memiliki kompetensi paedagogis. Perolehan rerata skor pada kompetensi pedagogik dengan kategori positif/baik di atas karena didukung oleh kelengkapan sarana-prasarana yang dimiliki madrasah dan tentu juga tidak terlepas dengan adanya pembinaan oleh kepala madrasah yang secara periodik telah dilakukan. Akan tetapi terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dari pihak kepala madrasah, yaitu empat guru PAI di dalam membuat perangkat pembelajaran masih belum dilengkapi dengan pembuatan program tahunan dan semester. Perangkat pembelajaran di sebagian komponen silabus tidak menyertakan sub-indikator penilaian. Hal serupa juga ditemukan sejumlah RPP yang tidak dilengkapi dengan instrumen penilaian. Sedangkan secara teoritis penilaian menjadi sebuah keharusan yang berfungsi sebagai alat ukur pembelajaran. Jika komponen penilaian tidak lengkap dan atau bahkan tidak ada, maka proses belajar mengajar tidak akan dapat diukur, yang pada gilirannya peserta didik akan dirugikan.

2. Kompetensi profesional guru PAI

Adapun hasil analisis dari kompetensi profesional untuk keseluruhan guru Pendidikan Agama Islam yang meliputi guru mata pelajaran Akidah Akhlak, al-Qur'an Hadits, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab sebagai berikut; rerata skor (\bar{x}) adalah 28,20 (kategori negatif), rerata standar deviasi 0,66, rerata skor maksimal angket adalah 3,3 dan rerata minimal angket pada 2,1 (lampiran 2). Jika dilihat rerata idelnya adalah 30, maka rerata skornya berada pada posisi di bawah rerata ideal (30). Hal ini dapat maknai bahwa secara umum guru Pendidikan Agama Islam belum memiliki kompetensi profesional. Hal ini dapat diartikan bahwa pada umumnya guru-guru PAI kurang dalam penguasaan materi yang diajarkan, sistematisasi materi yang disajikan, pemahaman SK dan KD, pengembangan materi dan pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, penjelasan sistem penila-

ian yang akan digunakan kepada peserta didik, serta penggunaan hasil evaluasi belajar dan pendapat peserta didik untuk perbaikan pembelajaran.

PENUTUP

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat dikemukakan bahwa kompetensi guru PAI MTs N Ponorogo memperoleh skor rerata untuk kelima guru tersebut adalah 62,60 sedang rerata skor idealnya 52,50 digolongkan pada kategori positif. Nilai rerata tersebut mengindikasikan bahwa guru menguasai kompetensi pedagogik, yaitu dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran baik. Kompetensi guru PAI MTs negeri Ponorogo memperoleh skor rerata untuk kelima guru tersebut adalah 28,20 dibawah skor ideal 30, maka rereta skor tersebut pada ketegori negatif. Nilai rerata tersebut mengindikasikan bahwa guru belum menguasai kompetensi profesional, yaitu dalam menguasai materi dan pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaibani, Omar Muhammad al-Tooumi. *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, .Jakarta, bulan Bintang: 1979.
- Arifin., HM, *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- BNSP. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP. 2006.
- _____,. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 4.1 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta. BSNP. 2001.
- _____,. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta: BSNP. 2001.
- Depdiknas. Undang-:..Undang RI No 20 Tk 2003 tentang Sisdiknas beserta Penjelasanannya. Bandung: Citra Umbara. 2003.
- _____, KBK Ketentuan Umum Pendidikan Prasekolah, Dasar, dan Menengah. Jakarta: Depdiknas, 2003.
- _____,. Pedoman Belajar Tuntas. Jakarta: Depdiknas. 2004.
- _____,. Peraturan Pemerintah RI no 19 tahun 2005 tentang SNP. Jakarta: Depdiknas. 2005.

- Fasli Jalal & Supriadi Dedi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya. 2001.
- Fich R. Curtis and Crunkilton R John. *Curriculum Development in Vocational and Technical Education; Planning, Content and Implementation*. Sidney: Allyn and Bacon. Inc. Boston London. 1979.
- Hamzah R Uno. *Teori Motivasi dan Pengaruhnya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Hungerford, H.R. & Yolck, Trudi L. *Changing Learner Behaviour Through Environmental Education*. Journal of Environmental Education, Vol.21.p.3.1990.
- Hanafi, Imam. *Plus Minus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Artikel pendidikan Diakses I Juli 2009.
- Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Joko Susilo, M. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Persiapan Sekolah Menyongsongnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Karnadi. *KTSP Membuat Guru Kreatif*. Diambil pada tanggal 25 Pebruari 2011 Dad: <http://www.erlangga.co.id>.
- Kusnandar. *Guru professional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Majid, Abdul. *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Martinis Yamid, H. *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada, 2008.
- Mardapi, Djemari. *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non-tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2008.
- Muslich, Masnur. *KTSP pembelajaran berbasis kompetensi dan lwntekstual panduan bag; guru, kepala sekolah dan pengawas selwlah*. Jakarta. Bumi Akasara. 2008.
- Miles B, N. & Huberman A.M. *Qualitative data analysis*. Sage Publications. Lnc. 1984.
- Muhaimin. et.al. *Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pedidikan (KTSP)pada sekolah dan madrasah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhaimin. *Arah baru pengembangan pendidikan Islam*. Bandung: Nuansa; 2010
- Muhammad Atiyah al-Abrosyi. *al-Tarbiyah al-Islamiyah dan Falasifuha*, Mesir, al-Halabi; 1969.
- Muhaimin dan Abdul Mujib. *Pemikiran pendidikan Islam; Kajian filosofis dan kerangga Dasar Operasionalnya*. Bandung: Trigenda Karya, 1993.

- Mulyasa E. *Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebuah panduan praktis*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- _____. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (kemandirian Guru dan Kepala Sekolah)*. Jakarta. Bumi Aksara. 2008.
- Marengke, Musa. *Evaluasi Kesiapan Guru SMU pada Pelaksanaan KTSP di Kota Temote*. Tesis. Tidak dipublikasikan. UNY. Yogyakarta. 2008.
- Olivia, P.F.,. *Developing the Curriculum* (:1" ed). New York: HarperCollins Publisher. 1992.
- Rostiyah NK. *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta, Bina Aksara; m1982.
- Suparno, Paul. *Kajian & Pengantar Kurikulum IPA SMP & Mrs*. Yogyakarta. Universitas Sanata Darma. 2007.
- Sulistiyorini, Sri. *Model Pembelajaran IPA Sekolah Dasar dan Penerapannya dalam KTSP*. Yogyakarta. Tiara Wacana. 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kwantitatif; Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2010.
- Sukardi. (2003). *Metodologi; Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta. Bumi Aksara
- Suryabrata B. *Beberapa Aspek Dasar Kependidikan*. Jakarta, Bina Aksara, 1983.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992
- Terry, G.R.,. *Principles of Management 7 ill Ed*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc. 1997.
- Trowbridge, L. W., Bybee, R. W., & Powell, J. C.,. *Teaching Secondary School Science: Strategies for Developing Scientific Literacy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. 2000.
- Wina Sanjaya. *Kurikulum dan Pembelajaran. Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2003.